

Ganjar Pranowo: ASN di Jawa Tengah tidak Perlu WFH

SEMARANG (IM)- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah beraktivitas normal, pada hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri 1443 Hijriah. Sehingga, tidak ada ASN yang pada hari ini melaksanakan kerja (aktivitas) dari rumah (WFH), kendati kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) memperbolehkan ASN bekerja dari rumah.

"WFH tidak perlu dilakukan para ASN di Jawa Tengah," kata gubernur, saat menggelar halal bihalal secara hybrid (langsung dan virtual), gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (9/5).

Meski ada kebijakan Menpan RB bahwa para ASN dibolehkan WFH sepekan ke depan, kata Ganjar, di Jawa Tengah semuanya masuk kerja dan kantor pemerintahan sudah normal.

Namun apabila ada ASN

yang belum bisa bekerja karena sakit atau berhalangan secara kesehatan boleh minta izin. Pelayanan kepada masyarakat langsung dilakukan karena ASN di Jawa Tengah tidak menjadi bagian dari arus balik.

"Kita yang ada di Jawa Tengah ini kan bukan tujuan arus balik, tetapi kita yang 'mengembalikan' teman-teman yang kemarin mudik, pada saat libur hari raya Idul Fitri (Lebaran)," kata Ganjar.

Sementara itu, acara Halal Bi Halal di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah, yang digelar secara hybrid ini juga diikuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Tengah berikut para staf.

Dalam kegiatan halal bi halal secara virtual ini juga dihadiri para direksi Bank Jateng serta sejumlah instansi vertikal seperti Pengadil Tinggi serta Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. ● pra

Pemkot Bogor Atur Jadwal ASN Kerja dari Rumah Selama Sepekan

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengatur jadwal kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama sepekan ke depan. Kebijakan itu sesuai dengan izin yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, kesempatan WFH bisa digunakan ASN untuk mengamati potensi peningkatan data kasus positif Covid-19. Dia menyampaikan, dalam sepekan ke depan memang masih dalam waktu krusial untuk mendeteksi penyebaran Covid-19 usai libur Lebaran 2022.

"ASN juga diatur oleh sekretariat, untuk saat ini dan ke depan ya. Tidak masalah semua bisa diatur, walaupun kecenderungannya (kasus positif Covid-19) semakin landai, karena kemarin nol kasus," kata Bima usai halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah di

halaman Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (9/5).

Bima memprediksi akan ada kenaikan data pasien positif Covid-19 yang dicatat pada sistem informasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Meski begitu, ia optimis penyebaran Covid-19 di Kota Bogor bakal terkendali dengan baik. "Kita amati betul data-data satu pekan ke depan. Sepertinya akan meningkat di atas kertas ya. Tetapi, harusnya terkendali setelah ini," kata Bima.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menyetujui usulan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menerapkan sistem kerja dari rumah bagi ASN untuk mengurangi kemacetan arus balik Lebaran 2022.

Tjahjo meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengatur jadwal bekerja dari rumah di instansi masing-masing. ● gio



IDN/ANTARA

JUMLAH PENUMPANG KRL COMMUTER LINE DI STASIUN BOGOR Sejumlah penumpang KRL Commuter Line melewati gerbang tiket elektronik di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (9/5). VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menyatakan jumlah penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran hanya sekitar 9.000 penumpang atau menurun dibandingkan hari kerja biasanya dikarenakan masa libur anak sekolah yang ditambah dan kebijakan pemerintah yang membolehkan ASN untuk WFH selama sepekan ke depan.

Pejabat Kemenag Jabar Didakwa Korupsi Dana Soal Ujian Madrasah Rp7,5 M

BANDUNG (IM)- Pejabat Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat, Agus Kosasih didakwa korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah hingga Rp 7,5 miliar. Agus merupakan Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Provinsi Jawa Barat pada 2017 dan 2018. Agus didakwa mengarahkan pengadaan soal ujian madrasah ke salah satu perusahaan demi mendapatkan cash back atau CSR. Ulahnya itu terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (9/5). Agus menjalani sidang perdana dengan materi pembacaan dakwaan atas perkara tersebut.

"Bahwa terdakwa Agus Kosasih menggunakan kesempatannya karena kedudukan selaku ketua KKMI Jawa Barat telah mengarahkan pengadaan soal ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT), penilaian akhir semester (PAS), try out (TO), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) untuk dilaksanakan oleh Martin Prawira selaku Direktur CV Mitra Cemerlang Abadi sehingga tidak dilaksanakan oleh para kepala Madrasah," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi

(Kejati) Jabar Arnold Siahaan saat membacakan dakwaan.

Perbuatan Agus tersebut dinilai JPU bertentangan dengan petunjuk teknis (juktis) penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag RI. Berdasarkan juktis, yang berhak menggunakan dan membelanjakan dana BOS ialah kepala madrasah di masing-masing lingkungan Kemenag Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.

Akan tetapi dalam praktiknya, Agus justru mengarahkan para KKMI di kabupaten dan kota se-Jabar untuk menggunakan CV Mitra Cemerlang Abadi untuk pengadaan soal ujian tersebut. Dalam perjalanannya, Agus melakukan rapat dengan para ketua KKMI Kabupaten dan Kota se-Jabar terkait penunjukan perusahaan tersebut.

"Dalam rapat tersebut terdakwa menentukan nilai harga untuk pengadaan soal-soal ujian yang disampaikan ke ketua KKMI kabupaten dan kota se-Jabar dengan mengatakan bahwa pihak perusahaan akan memberikan cash back atau CSR sebesar 15-20 persen dari nilai pembayaran pengadaan di masing-masing KKMI Kabupaten dan Kota," kata Arnold. ● pra

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

HALALBIHALAL ASN KOTA BOGOR

Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) bersalaman dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Plaza Balaikota Bogor, Jawa Barat, Senin (9/5). Pemerintah Kota Bogor menggelar Halalbihalal pada hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Forecast Dorong Iwan Setiawan Didefinisikan Menjadi Bupati Bogor

Plt Bupati Bogor tidak bisa merotasi pejabat eselon dua atau kepala dinas, padahal ada beberapa kepala dinas yang ia nilai berkinerja buruk. Kewenangan Plt Bupati itu pasti terbatas, jadi harus segera didefinisikan, kata Direktur Eksekutif Forecast, Lulu Azhari Lucky.

CIBINONG (IM)-

Direktur Eksekutif Forum Perencanaan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonomi (Forecast) Kabupaten Bogor, Lulu Azhari Lucky atau Ki Jalu mendorong Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan segera didefinisikan.

Lulu Azhari Lucky pun mengaku prihatin dengan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bogor non aktif Ade

Yasin oleh KPK bersama tiga orang pejabat Pemkab Bogor lainnya diduga melakukan penyuapan kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

"Saat ini banyak pekerjaan yang merupakan janji politik Ade Yasin baik yang sudah dianggarkan dan masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dan karena

kewenangan jabatan Plt Bupati Bogor terbatas maka saya mendorong agar Iwan Setiawan didefinisikan sebagai Bupati Bogor dan segera diisi posisi Wakil Bupati (Wabup)," pinta Lulu Azhari Lucky atau Ki Jalu kepada wartawan, Senin (9/5).

Ki Jalu menambahkan bahwa jabatan Plt Bupati Bogor tidak bisa merotasi pejabat eselon dua atau kepala dinas, padahal ada beberapa kepala dinas yang ia nilai berkinerja buruk.

"Kewenangan Plt Bupati itu pasti terbatas, contoh nyata Plt Bupati itu tidak akan bisa mengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR) yang saat ini kerjanya buruk, di mana banyak pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun 2021 yang menjadi temuan BPK, dan dijadikannya Ade Yasin sebagai tersangka itu pun dampak hasil kerja DPU-PR

yang jelek dan buruk sepanjang sejarah adanya PUPR pasca otonomi daerah. Harusnya bukan hanya Sekretaris DPU-PR saja yang dicokok KPK, tetapi juga Kepala DPU-PR nya pun harus ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan suap tersebut," tambah Ki Jalu.

Dengan alasan tersebut, ia juga mendorong kepada pemegang kebijakan pemerintahan daerah, dalam hal ini legislatif untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

"Saya dari Forecast, mendukung serta mendorong agar DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan sidang paripurna khusus dan meminta fatwa atau persetujuan Mahkamah Agung (MA) bila perlu untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa

Barat merekomendasi agar Iwan Setiawan didefinisikan sebagai Bupati Bogor dan bisa mengusulkan ke KPUD Kabupaten Bogor melalui DPRD untuk memilih Wabup Bogor sebelum Bulan Agustus tahun ini," tuturnya.

Ki Jalu berharap terulang kembali kekosongan posisi Wabup Bogor seperti yang terjadi di periode jabatan 2013-2018, pasca Rahmat Yasin terkena OTT KPK pada Tahun 2014 lalu dan definitifnya Nurhayanti menjadi Bupati Bogor di sisa jabatan.

"Dengan pertimbangan luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bogor, dengan didefinifikannya Iwan Setiawan menjadi Bupati Bogor maka ia bisa mengambil sikap yang strategis, seperti program satu milyar satu desa (Sami Sade)," katanya. ● gio

Sidak, Plt Bupati Bogor Kaget, Ada Warga Urus KTP Dua Tahun tak Selesai

CIBINONG (IM)- Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mendapat keluhan dari warga terkait lamanya mengurus KTP, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Senin (9/5).

"Tadi ada keluhan, warga mengurus KTP itu sudah dua tahun belum selesai. Ini pasti ada masalah. Karena saya tanya tadi warga mengukanya lama itu di desa dan kecamatan. Kalau langsung ke Disduk, saya pastikan sehari selesai," tegas Iwan.

Iwan memastikan untuk memperbaiki reformasi birokrasi pengurusan administrasi kependudukan, termasuk menghapus denda keterlambatan dalam mengurus administrasi kependudukan.

"Nanti kita kaji lagi aturan bagaimana. Untuk denda kalau

memang harus dihapus nanti kita revisi aturan-aturannya," tegas politisi Gerindra itu.

Dia menegaskan kepada jajarannya agar segala urusan birokrasi menyangkut masyarakat jangan dipersulit. Salah satu upaya Pemkab Bogor adalah menyediakan UPT agar semakin

dekat melayani masyarakat.

"Ya harus dibuat simpel. Jangan terlalu birokrasi. Kasihan masyarakat. Padahal kita sudah siapkan UPT di wilayah untuk mempermudah masyarakat agar pelayanan semakin dekat. Bukan semakin rumit," katanya. ● gio

APEL PAGI DAN HALALBIHALAL DISDIK JABAR

Kadisdik Jabar: Mari Sebarkan Berita Baik

BANDUNG (IM)- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdik Jabar untuk mencatat serta menyebarkan informasi dan berita baik.

Hal tersebut disampaikan Kadisdik pada apel pagi sekaligus Halal bihalal Idulfitri 1443 Hijriah di Lapangan Kantor Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No.6, Kota Bandung, Senin (9/5).

"Jadilah kita semua pengagum malaikat Rokib (yang mencatat kebaikan). Mari selalu sebarkan informasi baik serta positif untuk menambah iman dan memperuk tali persaudaran kita," imbaunya.

Informasi dan berita baik yang bisa disebarkan, tambah Kadisdik, adalah prestasi yang sudah diraih oleh Disdik Jabar. Di antaranya, Disdik Jabar menjadi pengelola BOS terbaik tingkat nasional, 35 SMK negeri resmi menjadi Badan Lembaga Umum Daerah (BLUD) serta naiknya jumlah sekolah (31 sekolah swasta dan 7 seko-

lah negeri).

"Rata-rata lama sekolah dan partisipasi murni juga naik," ungkapnya.

Kadisdik pun menyampaikan maaf lahir dan batin kepada seluruh ASN Disdik Jabar. "Taqqabballah minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Sampaikan salam hormat saya kepada keluarga Bapak/Ibu yang tidak bisa hadir untuk bersilaturahmi ke rumah Bapak/Ibu semua. Semoga selalu diberikan kesehatan," ucapnya. ● lys



DISDIK © Fouzan Kusuma/DISDIK PROV. JABAR

Kadisdik Jabar, Dedi Supandi pada apel pagi sekaligus Halalbihalal Idul Fitri 1443 Hijriah di Lapangan Kantor Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No.6, Kota Bandung, Senin (9/5).

Danau Cirata Dipenuhi Sampah Usai Libur Lebaran

PURWAKARTA (IM)- Objek wisata Waduk Cirata yang membentang di wilayah Cianjur, Purwakarta dan Bandung Barat dipenuhi sampah setelah masa libur Lebaran. "Ini sampah yang sangat luar biasa, mengotori Danau Cirata dan airnya sudah sangat keruh, sehingga kualitas ikannya pasti di bawah standar," kata Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi dalam keterangannya yang diterima di Purwakarta, Senin (9/5).

Selama libur Lebaran anggota DPR RI, Dedi Mulyadi menghabiskan waktu dengan berkeliling ke sejumlah tempat untuk memantau kegiatan masyarakat. Salah satunya mengunjungi Waduk Cirata untuk bertemu nelayan dan wisatawan. Setelah beberapa kali berkunjung ke tempat tersebut, Dedi Mulyadi justru disambut dengan sampah yang mengapung menghiasi hampir seluruh sudut

dari waduk yang membentang di tiga kabupaten, yakni Cianjur, Purwakarta dan Bandung Barat.

Selain dipenuhi sampah, kondisi air Waduk Cirata kini semakin keruh, karena jumlah keramba ikan sangat banyak. Hal itu membuat jumlah pakan yang diberikan pada ikan, sehingga kualitas ikannya pasti di bawah standar, kata Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi dalam keterangannya yang diterima di Purwakarta, Senin (9/5).

Kondisi ini, lanjutnya, tidak bisa terus dibiarkan, harus dilakukan tindakan yang nyata bersama-sama. Ia tak ingin waduk tersebut terus dieksploitasi menjadi sumber pembangkit listrik, perternakan, kegiatan nelayan dan rekreasi, namun dibiarkan tercemar. ● pra

Hendak Wudu, Seorang Lansia Tewas Tercebur ke Sumur Sedalam 12 Meter

BOGOR (IM)- Seorang pria lansia berinisial M (66), terpeleset saat hendak wudu lalu tercebur ke dalam sumur dengan kedalaman 12 meter di Kampung Pondok Manggis, Desa Bojong Baru, Bojonggede, Bogor, pada Minggu (8/5).

Kapolsek Bojonggede AKP Dwi Susanto mengatakan, korban sudah tidak bernyawa saat dievakuasi oleh tim Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). "Setelah dilakukan pertolongan pihak Damkar, kondisi korban berhasil diangkat pukul 17.30 WIB dalam keadaan sudah tidak bernyawa," kata Dwi saat dikonfirmasi, Senin (9/5).

Menurut penuturan anak korban berinisial S (35), kata Dwi, korban saat itu hendak mengambil air wudu untuk melaksanakan shalat ashar. "Pada pukul 16.00 WIB, M

(korban) akan mengambil air wudu untuk melaksanakan ibadah shalat ashar, karena terpeleset sehingga jatuh tercebur sumur sedalam 12 meter," ujar dia.

Saat kejadian, dikatakan Dwi, anak korban mendengar suara samar-samar benda terjatuh di belakang rumahnya, kemudian langsung memastikan sumber suara tersebut. "Saat dicek oleh S (anak korban) bahwa terlihat M (korban) sudah terjatuh ke dalam sumur," ujarnya.

Mengetahui hal itu, lanjut Dwi, keluarga korban langsung menghampirinya ke RT setempat untuk meminta pertolongan. Pihak RT kemudian menghubungi Dinas Damkar untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam sumur. Selain itu, keluarga korban juga berupaya melakukan pertolongan. ● gio